

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persembahan	i
Motto	ii
Kata Pengantar.....	iii
Intisari	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan dan Tujuan Penelitian.....	14
C. Kerangka Konseptual	15
C.1. Demokrasi Parlementer dan Presidensiil	16
C.2. DPRD sebagai lembaga perwakilan politik	19
C.2.1. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Politik.....	19
C.2.2. Karakteristik Wakil Rakyat	24
C.3. Tugas dan Fungsi Eksekutif	27
C.4. Birokrasi dan Demokrasi	29
C.5. Pola Hubungan Legislatif-Eksekutif	36
C.6. Game Theory dan Rational Choice Theory dalam Pembuatan Kebijakan	38
D. Metode Penelitian.....	40
BAB II : SETTING POLITIK HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF	
DI KABUPATEN BANTUL	44
A. Setting Politik Masyarakat Bantul.....	46
B. Setting Politik Legislatif (DPRD) Bantul.....	50
C. Setting Politik Eksekutif Bantul	59
D. Basis Politik Hubungan Legislatif dan Eksekutif : Rekrutmen Bupati dan	



BAB III. RELASI KEKUASAAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	72
A. Relasi Kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Desa	74
A.1. Usulan Eksekutif	75
A.2. Penolakan Legislatif atas usulan Eksekutif tentang masa Jabatan Kepala Desa	77
A.3. Revisi Perda I : Menguatnya Legislatif	80
A.4. Revisi Perda II : Menuju Equilibrium	86
B. Relasi Kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Persetujuan Kerjasama Proyek bantu Kota Mandiri (BKM)	95
C.1. Usulan Eksekutif tentang Bantul Kota Mandiri	95
C.2. Persetujuan BKM : Dominasi Eksekutif	98
C. Relasi Kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Penyusunan Perda tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	108
B.1. Usulan Eksekutif tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	108
B.2. Perda tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk : Kuatnya Legislatif	109
D. Variasi Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan Perda	114

BAB IV : RELASI KEKUASAAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

DALAM PENYUSUNAN APBD	119
A. Relasi Kekuasaan dalam Penyusunan APBD Tahun 2000	119
B. Relasi Kekuasaan dalam Penyusunan APBD Tahun 2001	130
B.1. Usulan Eksekutif tentang RAPBD tahun 2001	130
B.2. Penetapan APBD 2001 : Kuatnya legislatif	131
C. Relasi Kekuasaan dalam Penyusunan APBD Tahun 2002	147
C.1. Usulan Eksekutif tentang RAPBD Tahun 2002	147
C.2. Balancing antara Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan APBD Tahun 2002.....	150



BAB V. PENUTUP	163
----------------------	-----

A. Kesimpulan	163
---------------------	-----

B. Rekomendasi	167
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	168
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------	--